



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 9
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / Ke-3
Dengan	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 Desember 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: DR. H. NOOR ACHMAD, M.A
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Laporan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Hadir	: 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI 2. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.37 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua BAZNAS dan Ketua BWI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membahas tentang **Peningkatan Efektifitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak** disimpulkan sebagai berikut.

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami besaran anggaran KPAI dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia untuk tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*) yang digunakan untuk program sebagai berikut:
 - a. Pengawasan penanganan terpadu korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA), sebesar Rp1.700.000.000,- (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*).
 - b. Peran pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) terhadap penanganan terpadu korban KTA, sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).
 - c. Pengawasan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, sebesar Rp700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)
 - d. Laporan indeks pengawasan terkait perlindungan anak, sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*)
 - e. Layanan penanganan pengaduan masyarakat, sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
 - f. Pengawasan kasus tentang perlindungan anak, sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*)
 - g. Penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti, sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
 - h. Laporan data dan informasi dan rekomendasi serta tindak lanjut terkait perlindungan anak, sebesar Rp700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)
 - i. Laporan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI, sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*)
 - j. Layanan perkantoran, sebesar Rp7.000.000.000,- (*tujuh miliar rupiah*)

2. Komisi VIII DPR RI mendesak KPAI untuk menyelesaikan berbagai persoalan anak di Indonesia, namun agar pelaksanaan perlindungan anak lebih optimal, hendaknya memperhatikan saran dan pandangan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Melakukan penguatan kelembagaan internal KPAI dan membentuk tata kerja organisasi yang jelas mekanismenya demi meningkatkan kinerja organisasi yang optimal.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan cepat tanggap terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh anak Indonesia.
 - c. Data berbagai permasalahan anak disampaikan dalam bentuk laporan yang lebih rinci dan lengkap berbasis wilayah dan fakta di lapangan, sehingga menjadi bahan masukan bagi Komisi VIII DPR RI untuk menindaklanjuti di Kementerian/Lembaga
 - d. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan lintas sektor, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk mendukung kinerja KPAI dalam mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Komisi VIII DPR RI akan menindaklanjuti pertemuan dengan KPAI untuk membahas peningkatan anggaran KPAI dengan terlebih dahulu menerima penjelasan dari KPAI terkait Tupoksi dan tata kerja KPAI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. H. NOOR ACHMAD, M.A